

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menjadi salah satu Negara yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk yang padat, serta termasuk salah satu Negara dengan utang yang tergolong tinggi dikarenakan masih banyak masyarakat yang termasuk kedalam masyarakat miskin. Jumlah masyarakat di Indonesia pada BPS tahun 2022 mencapai 275,77 juta orang dan mendapat peringkat keempat penduduk terbanyak di dunia dan di antara negara G20. Penduduk Indonesia sebanyak 26,36 juta orang pada september tahun 2022 merupakan penduduk miskin dan meningkat sebesar 0,20 juta orang pada maret 2022 dengan persentase sebesar 9,57%. Kemiskinan merupakan topik atau perbincangan hangat yang dibicarakan karena berhubungan dengan kebijakan pembangunan di setiap negara termasuk negara maju dan berkembang, sehingga kemiskinan ini sering sekali menjadi faktor penghambat di dalam pembangunan negara-negara berkembang yang diikuti banyaknya penduduk dibawah garis kemiskinan. Adapun penduduk yang berjumlah 267 juta termasuk dalam penduduk dibawah garis kemiskinan yang didukung dengan banyaknya keragaman suku daerah dan kelas sosial menjadikan Indonesia negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan masuk peringkat keempat terbesar di dunia.

Terselenggarakannya kesejahteraan untuk setiap lapisan masyarakat menjadi tujuan utama setiap negara termasuk negara berkembang. Di Indonesia hambatan yang kerap terjadi dalam mencapai kesejahteraan bagi setiap masyarakatnya adalah

kemiskinan, namun tidak menutup kemungkinan juga negara maju mengalami masalah kemiskinan tetapi dominan dialami negara-negara berkembang. Upaya untuk mengatasi kemiskinan dilakukannya peningkatan kesejahteraan pada bidang ekonomi dan sosial melalui kebijakan pemerintah yang sudah dirancang dan secara perlahan dilakukan ke setiap daerah-daerah di Indonesia. Banyaknya strategi yang dilakukan pemerintah mulai dari memberikan ruang kepada para pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja, melakukan pembangunan bagian pertanian, dan pembangunan perbaikan infrastruktur dan diikuti program-program lain dengan tujuan mengentas kemiskinan. Adanya keterbukaan kesempatan kerja, perluasan lahan pertanian, pembagian dana bergulir serta adanya pembangunan infrastruktur sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk meretas kemiskinan. Adapun pada kenyataannya hal tersebut belum dapat teratasi secara optimal.

Berbagai jenis program yang dirancang pemerintah sebagai terobosan dalam meratakan kesejahteraan masyarakat belum memberikan pengaruh besar, sehingga tujuan nasional pembangunan masih berfokus kepada pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masih menjadi hambatan berkepanjangan. Upaya yang perlu dilakukan yaitu memperbaiki pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi, politik dan berbagai aspek lainnya. Pembangunan sebenarnya tidak hanya berfokus terhadap pembangunan fisik, tetapi perlunya perubahan cara berpikir dan nilai masyarakat menuju perubahan yang lebih baik mengikuti kemajuan zaman.

Pembangunan dalam jangka panjang direalisasikan dengan tujuan dapat memberikan perubahan pembangunan yang lebih maju dan memadai, bahkan mampu mengentaskan kemiskinan sesuai yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dibutuhkan penanggulangan kemiskinan berupa perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Masalah kurang sejahteranya masyarakat atau biasa disebut kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang mencakup perluasan yang berkaitan dengan ketidakmampuan dalam akses ekonomi, politik dan sosial-psikologis yang dapat mengganggu pembangunan di daerah sehingga hak-hak manusia tidak dapat terpenuhi. Banyak akibat yang terjadi dari kemiskinan yang melanda sehingga bersifat menyebar pada tatanan kemasyarakatan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Berbagai macam masalah kemiskinan menjadi permasalahan serius pada masyarakat secara mendasar yang membutuhkan solusi dalam penanganan menggunakan pendekatan sistematis, terpadu dan keseluruhan agar beban yang ditopang negara dapat berkurang dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Negara Indonesia untuk layak berkembang dengan mengusung kehidupan yang bermartabat. Kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanggulangi kemiskinan sebagai batu loncatan dalam

pelaksanaan rencana Pembangunan Jangka Panjang dan terpenuhinya kesepakatan global Pembangunan Milenium.

Melalui perspektif ekonomi, kemiskinan yang dimaksud yaitu kurangnya potensi yang tersedia di daerah antara lain tenaga manusia atau sumber daya manusia dan kekayaan alam yang mendukung atau biasa disebut sumber daya alam yang digunakan untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidup. Namun sumber daya yang dimaksud seperti halnya finansial, harta atau kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada aspek politik, kemiskinan diartikan sebagai kekuasaan yang mencakup tatanan sistem politik yang menentukan potensi atau kemampuan beberapa masyarakat untuk menjangkau dan memanfaatkan sumber daya. Pada aspek sosial-psikologis, kemiskinan diartikan sebagai kurangnya jaringan dan dukungan dari struktur sosial yang mewujudkan peluang untuk meningkatkan produktivitas kelompok masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah terletak di antara provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jawa Tengah mencapai 1.120 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2021. Pertumbuhan kepadatan penduduk meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan terjadinya tindak kriminal. Karena masyarakat sering mengalami permasalahan ekonomi, kekurangan kekayaan, kekurangan pangan, dan kurangnya keamanan, masyarakat beralih ke berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga keadaan ini juga mempengaruhi munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru

kegiatan masyarakat sehingga mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2022, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin ketiga terbesar di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3.858.230 orang.

Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah dan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Jumlah penduduk Kota Semarang per Juni 2022 adalah 37.032.410 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 18.614.868 jiwa dan perempuan sebanyak 18.417.542 jiwa. Sebaliknya, Kota Semarang menjadi kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Tengah pada tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 1. 1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan Kota di Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (persen)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Magelang	9,27	9,44	8,65	7,58	7,75	7,10
Surakarta	47,03	48,78	45,94	9,03	9,40	8,84
Salatiga	9,69	10,14	9,45	4,94	5,14	4,73
Semarang	79,58	84,45	79,87	4,34	4,56	4,25
Pekalongan	22,16	23,49	21,81	7,17	7,59	7,00
Tegal	19,55	20,27	19,78	7,80	8,12	7,91

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan, jumlah penduduk miskin terbesar berdasarkan kota di Jawa Tengah dari tahun 2020 hingga tahun 2022 berada pada Kota Semarang. Hal ini terjadi karena sebagian besar kepala rumah tangga di Kota

Semarang masih berpendidikan rendah dengan pekerjaan sebagai buruh yang upahnya tidak sesuai dengan tanggungan hidupnya. Disisi lain terjadi ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang dikategorikan masyarakat miskin dan rentan miskin dalam menunjang pengentasan kemiskinan. Adapun kota selanjutnya dengan jumlah penduduk miskin terbesar yaitu Surakarta, Pekalongan, Tegal, Salatiga dan Magelang. Pemerintah sebagai subjek dalam pembuatan keputusan melakukan beberapa cara untuk mengatasi kemiskinan di daerahnya, yaitu dengan mengeluarkan berbagai program untuk masyarakat seperti adanya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mereka yang sudah lansia dan memiliki tanggungan banyak yang penghasilannya tidak cukup menghidupi keluarganya, ada juga Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah dan siswa agar proses penimbaan ilmu difasilitasi dengan baik, Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk siswa yang orangtuanya tidak mampu, Selain itu juga mendukung Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi masyarakat tidak mampu lagi berobat dan lansia, Program Beras Keluarga Miskin (Raskin) bagi masyarakat miskin yang banyak tanggungan, serta Program Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PPMN), potensi untuk didukung oleh pemerintah melalui penguatan masyarakat dan kapasitasnya.

Program pemerintah yang disalurkan secara adil kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu dan miskin diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut, meningkatkan kesejahteraan, bahkan mengentaskan kemiskinan. Upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan strategi pengentasan kemiskinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Kebijakan tersebut berupa penetapan cara atau usaha untuk pengentasan ketidakmampuan masyarakat dalam membiayai kebutuhan hidup dalam bentuk program bantuan sosial berbasis keluarga yang komprehensif, pembentukan kelompok masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan lewat potensi masyarakat dan daerah itu sendiri, meretas ketidakmampuan masyarakat dalam membiayai hidupnya dapat diberikan solusi melalui pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan makro yang memanfaatkan kecanggihan teknologi zaman sekarang ini dan kegiatan-kegiatan lainnya secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Kota Semarang meluncurkan inovasi bernamakan “Gerbang Besar” (Gerakan Terpadu Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Keserasian Ekonomi, Pendidikan, Ekosistem, dan Etika Masyarakat) berdasarkan RPJMD 2016-2021. Salah satu programnya adalah keberadaan Kampung Tematik yang diusahakan terbentuk di setiap daerah. Kampung tematik diharapkan menjadi solusi atau terobosan terbaik menurut pemerintah setempat untuk mengatasi kemiskinan mulai dari pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat dengan menanggulangi sarana prasarana dasar pemukiman warga melalui sumber daya setempat sehingga kampung tematik merasa didukung lewat ketersediaan masyarakat untuk diberdayakan.

Kampung tematik merupakan instrumen inovatif yang dirancang pemerintah untuk mengatasi pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,

dengan tujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat dan daerah, memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian, berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kampung Tematik, di dalamnya terdapat pernyataan bahwa indikator yang digunakan dalam pembentukan adalah daerah yang tergolong miskin tinggi. Potensi daerah dan masyarakatnya dapat dikembangkan dengan bantuan masyarakat itu sendiri untuk berperan aktif dan mau diberdayakan, serta adanya permasalahan sosial yang sedang terjadi dan harus diselesaikan. Untuk pengembangan dan pembentukan kampung tematik, dana akan digunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tanggung jawab sosial masing-masing perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat Kampung tematik ini akan didirikan di wilayah-wilayah di Kota Semarang yang mempunyai ruang untuk diberdayakan.

Kampung tematik diharapkan berdampak pada perekonomian, edukasi, ekosistem dan etos masyarakat. Perekonomian meningkat maka berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang berada pada wilayah kampung tematik. Kemudian adanya edukasi berpengaruh pada pemahaman masyarakat mengenai karakteristik wilayah, memetakan, mengelola dan memberdayakan tenaga masyarakat dan didukung dengan hasil alam yang ada di lingkungan daerah yang sudah tersedia sebelumnya. Adanya ekosistem berkaitan dengan mengidentifikasi potensi dan permasalahan lingkungan pemukiman dengan memberdayakan masyarakat

setempat. Etos yang berkaitan dengan sikap, karakter, dan semangat gotong royong masyarakat untuk peduli terhadap pembangunan dan perawatan lingkungan.

Pembentukan kampung tematik Kota Semarang mempertimbangkan potensi lokal sebagai karakter kampung tematik dengan tujuan mengembangkan potensi yang dimiliki kampung tersebut, mengatasi permasalahan lingkungan permukiman dan kemiskinan yang masih melanda kampung tersebut. Perbaikan kualitas lingkungan sangat berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekitar, sehingga pembentukan kampung kerajinan bambu dan rotan dapat didukung dengan lingkungan yang bersih indah dan asri agar dapat menarik minat pengunjung yang ingin berkunjung.

Salah satu kelurahan di daerah Kota Semarang yaitu Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, mempunyai suatu produk unggulan untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik sehingga sangat potensial dalam memberikan perubahan kearah kemajuan. Kelurahan Pakintelan memiliki luas wilayah sebesar 247.808 ha yang terdiri dari 6 RW dan 25 RT dengan jumlah penduduk 5.250 jiwa terdiri dari 317 KK. Mayoritas mata pencaharian penduduk di Kelurahan Pakintelan pengrajin, petani dan sebagian lagi buruh jasa dan karyawan swasta di pabrik. Hal ini memberikan pertimbangan pada Pemerintah daerah dan Walikota Semarang untuk dikembangkan dan diberdayakan sehingga pada Tahun 2017 Kelurahan Pakintelan ditetapkan sebagai Kampung Tematik dari berbagai banyaknya kampung tematik yang sudah dibangun di Kota Semarang.

Di antara luasnya wilayah Pakintelan terdapat satu wilayah yang memiliki potensi dari sumber daya manusia dan sumber daya alamnya dalam bidang perekonomian yaitu Kampung Winongsari. Terletak di wilayah RW 02 Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang terdiri dari 5 RT dengan jumlah penduduk sebesar 1.066 jiwa per 317 KK. Latar belakang masyarakat dalam bidang ekonomi mengangkat Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan sebagai salah satu kampung tematik di Kelurahan Pakintelan. Banyak masyarakat miskin hingga menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan rendah masih bekerja sebagai buruh, sehingga proporsi kelompok rentan di Kelurahan Pakintelan masih sangat tinggi. Padahal, daerah ini mempunyai potensi dan aset besar yang jika dikembangkan dapat menghilangkan segala kelemahan atau kekurangan yang mungkin timbul di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan keunggulan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat pendukung kerajinan bambu dan rotan melalui banyaknya sumber daya alam seperti bambu sebagai bahan yang dimanfaatkan dalam sebuah kerajinan.

Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di Kelurahan Pakintelan masih memiliki kendala pada pengrajinnya, hal ini membutuhkan pembinaan dari dinas atau pemerintah daerah setempat yang berhubungan dengan pengembangan potensi wilayah agar terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan. Disisi lain pembinaan juga berguna untuk mengembangkan bentuk/model anyaman menyesuaikan dengan gaya dan kebutuhan masa kini. Potensi yang dimiliki daerah Kelurahan Pakintelan yaitu membuat kerajinan bambu dan rotan. Alhasil dari kerajinan tersebut maka

terbentuklah Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (Kampung KRABATAN). Kerajinan ini termasuk strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Adapun kerajinan tersebut menjadi salah satu warisan turun temurun.

Kampung KRABATAN dibentuk oleh pemerintah setempat yang memiliki tujuan mendorong perekonomian masyarakat dengan mengelola potensi masyarakat setempat. Metode yang digunakan yaitu dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menyelesaikan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat. Implementasi dari pemberdayaan masyarakat tersebut dengan mengedukasi masyarakat setempat dalam upaya peningkatan kemampuan, kreativitas, dan pengetahuan dengan cara melibatkan langsung masyarakat. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan tujuan dapat menyejahterakan rakyat dan menuntun masyarakat dalam upaya kemandirian dan inovasi. Berbagai bidang pemberdayaan dapat dilakukan antara lain pada bidang pertanian, perdagangan, industri, berkebun, termasuk kerajinan bambu dan rotan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

Beberapa potensi masyarakat Kelurahan Pakintelan yaitu mampu membuat kerajinan bambu dan rotan sehingga berkesempatan menjadi kampung tematik. Dengan potensi yang dimiliki masyarakat setempat, maka dibuatlah Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan atau Kampung KRABATAN. Selain potensi yang dimiliki masyarakat setempat, pengembangan Kampung KRABATAN ini merupakan usulan dari Walikota untuk mengembangkan potensi sehingga terciptanya masyarakat yang unggul.

Berdasarkan observasi penulis pada saat pra penelitian, pemberdayaan masyarakat melalui Kampung kerajinan bambu dan rotan memiliki banyak potensi dan kreativitas yang harus dikembangkan. Potensi sumber daya alam seperti bambu yang banyak ditemui di Pakintelan dan didukung dengan masyarakat Pakintelan yang bergabung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan yang memiliki kreativitas dengan mengayam kerajinan yang terbuat dari bambu dan rotan dengan berbagai model sesuai dengan selera dan kebutuhan masa kini. Sumber daya manusia di Pakintelan sangat mendukung dalam keberjalanan kegiatan pemberdayaan namun pengrajin di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan sangat minim. Hal ini terjadi karena adanya pekerjaan yang lebih menjanjikan sesuai dengan upah yang diterima sehingga masyarakat lebih tertarik untuk bekerja di luar Pakintelan.

Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan berdiri pada Tahun 2017 sebagai langkah pemerintah untuk memberdayakan masyarakat RW 02 Winongsari dengan pengrajin yang berjumlah 8 orang, 1 orang pengrajin rotan dan rotan, 7 lainnya pengrajin bambu. Perkembangan kampung kerajinan bambu dan rotan sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan semakin tahun semakin bertambahnya pengrajin di Kampung Kerajinan bambu dan rotan. Tahun 2018 pengrajin di Kampung kerajinan bambu dan rotan bertambah sebanyak 3 orang dan ditahun 2019 bertambah sebanyak 2 orang. Namun pada tahun 2020 pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat berhenti berkegiatan di luar rumah. Terjadilah penurunan perekonomian yang berdampak pada masyarakat yang mengikuti kegiatan di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan. Tahun 2020 hingga 2022 masyarakat

mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan dan meninggalkan pekerjaan sebagai pengrajin di Kampung Kerajinan bambu dan Rotan. Hingga tahun 2023 pengrajin yang tersisa di kampung Kerajinan bambu dan rotan hanya berjumlah 5 orang dan tidak bertambah hingga saat ini. Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan dengan pengrajin yang berjumlah 5 orang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memproduksi kerajinan yang terbuat dari bambu dan rotan dengan memanfaatkan kreativitas masyarakat. Saat ini pemerintah dan masyarakat mengusahakan kenaikan jumlah pengrajin di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan dari kalangan anak muda untuk dapat meneruskan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terdapat beberapa kendala pada setiap tahapannya antara lain pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kampung kerajinan bambu dan rotan yang perlu pembenahan untuk dapat tertata dan terorganisir. Hal ini dapat dibuktikan dengan kunjungan penulis ke Kampung kerajinan bambu dan rotan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. 1 Kondisi Lingkungan Kampung KRABATAN



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Terdapat masalah pada saat menuju Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan yaitu peta yang disediakan tidak dapat membantu menemukan wilayah. Para pengunjung ketika ingin ke lokasi kadang kala bingung dan tersesat dikarenakan peta penunjuk lokasi yang disediakan dipinggir jalan sudah buram dan tidak diperbaharui oleh pemerintah setempat. Tidak sedikit para pengunjung yang pulang dikarenakan kesusahan dalam menemukan Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan penulis di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 1. 2 Peta Lokasi Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Masalah lain yang terjadi adalah infrastuktur yang ada di Kelurahan Pakintelan. Infrastruktur merupakan prasarana pembangunan yang harus ada di setiap wilayah agar dapat mempermudah masyarakat atau pengunjung dalam menjangkau wilayah tersebut secara aman dan nyaman. Infrastruktur ditujukan pada pembangunan fisik

pada wilayah yang bisa dikatakan fasilitas umum, seperti jalan raya, sekolah rumsah sakit, pelabuhan air bersih, bandar udara dan lain sebagainya.

Permasalahan infrastruktur yang terjadi di Kelurahan Pakintelan adalah keadaan jalan raya. Berdasarkan survey pra penelitian, kondisi jalan diwilayah Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan Kelurahan Pakintelan cenderung mengalami kerusakan. Kerusakan jalan berpengaruh pada aktivitas masyarakat dan pengunjung dalam melakukan transaksi jual beli kerajinan dan kunjungan sehingga dampak dari kondisi jalan dapat diminimalisir dengan cara berhati-hati pada saat perjalanan di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan Kelurahan Pakintelan. Kondisi jalan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 3 Kondisi jalan di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Terdapat tiga tahapan pemberdayaan yang akan dianalisis diantaranya tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Pada setiap tahapan memiliki permasalahan yang menjadi pemicu perkembangan Kampung Kerajinan bambu dan Rotan. Permasalahan pada tahap penyadaran berupa minimnya

sosialisasi di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan sehingga timbul masalah baru seperti kurangnya keikutsertaan dan minat masyarakat terlebih anak muda yang diharapkan dapat membangun daerahnya untuk ambil adil dalam kegiatan pembuatan kerajinan. Hal ini dibenarkan oleh Bapak AS, selaku Koordinator di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di Kelurahan Pakintelan. Berdasarkan wawancara pra penelitian (Rabu, 12 April 2023) dengan bapak AS yang menyatakan:

“Sosialisasi minimal seminggu sekali waktu dulu sebelum Pandemi Covid-19 pasti diadakan, namun sekarang pemerintah kelurahan belum memulai kembali sosialisasi yang pernah dilakukan. Sehingga sekarang ketertarikan masyarakat terlebih anak muda menurun sekali untuk ikut serta pemberdayaan ini guna melestarikan Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa minat dari masyarakat dalam ikut pemberdayaan masih tergolong rendah. Padahal adanya sosialisasi ini merupakan tahap awal pengenalan kepada masyarakat mengenai pemberdayaan Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan. Sejalan dengan pernyataan Bapak AS yang menyatakan bahwa pada kegiatan pemberdayaan ini sangat membutuhkan keikutsertaan anak muda karena anak muda yang ada di Kampung Kerajinan bambu dan Rotan Kelurahan Pakintelan dapat meneruskan pemberdayaan yang sudah dibentuk dan dapat juga memperbaharui cara kerja dan cara pemasaran mengikuti perkembangan saat ini.

Tahap pengkapasitasan, pada tahap ini terdapat masalah seperti tidak adanya pengadaan pelatihan. Pelatihan yang dimaksud dapat menambah pengetahuan dan daya dukung melalui kualitas dan kapasitas masyarakat yang semakin hari semakin meningkat yang berguna untuk pengembangan Kampung kerajinan Bambu dan

Rotan. Hal ini sejalan juga dengan wawancara pra penelitian yang dilakukan penulis dengan Bapak AS yang menyatakan:

“Saya sekarang ini mandiri sendiri, tidak ada komunikasi dengan Lurah. Dulu memang ada pelatihan-pelatihan, ada kompensasi dari Kota Semarang, namun sekarang tidak ada lagi. Saya juga kesulitan mencari pekerja/masyarakat yang dapat membantu saya dalam pemberdayaan ini dikarenakan tidak adanya pelatihan sehingga saya kesulitan mengajari satu persatu masyarakat yang ingin bekerja dengan saya.”

Disamping itu juga pemerintah tidak memberikan bantuan kepada masyarakat (Bapak AS) dalam memfasilitasi keberjalanan kegiatan pemberdayaan. Hal ini diutarakan oleh Bapak AS yang menyatakan:

“Saya tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah Kelurahan baik berupa dana ataupun bantuan lainnya seperti alat penyemprot cat, tang, gunting dan lain sebagainya. Namun saya sangat menunggu dan membutuhkan bantuan tersebut, karena selain pengimpor rotan saya juga menyewa alat penyemprot cat yang dimana harga sewanya lumayan mahal disetiap bulannya.”

Pernyataan di atas menunjukkan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan masih tergolong sedikit. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak AS yang menyatakan kesulitan mengajari dikarenakan tidak adanya pelatihan, sehingga masyarakat kembali lagi menjadi buruh dan tidak serius dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Masyarakat hanya sebatas hidup berdampingan dengan kelompok pengrajin Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan. Sehubungan dengan itu, dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemerintah tidak memberikan bantuan apapun sehingga masyarakat mengalami kendala dalam pembiayaan pemberdayaan. Sehingga pada prosesnya masyarakat hanya memutar hasil dari kerajinan Bambu dan Rotan yang kemudian dijadikan modalnya dalam mengimpor dan menyewa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan di kampung Kerajinan Bambu dan Rotan.

Tahap terakhir yaitu tahap pendayaan, masalah yang terjadi pada tahap ini yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan *digital marketing*. Hal ini dibenarkan oleh Bapak AS, selaku Koordinator di Kampung Kerajinan bambu dan Rotan di Kelurahan Pakintelan. Berdasarkan wawancara pra penelitian (Rabu, 12 April 2023) dengan Bapak AS yang menyatakan:

“Saya menjual hasil kerajinan ini ke toko, kemudian toko ini menjual online juga dan lama kelamaan terkenal. Sehingga sekarang ini saya yang memproduksi, toko yang menjual. Hal ini dikarenakan saya tidak menguasai handphone dan juga saya kerja memproduksi barang sehingga tidak punya waktu untuk melihat *handpone* setiap saat.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sekarang ini kemahiran dalam menggunakan internet dan platform online dapat membantu dalam keberjalanan bisnis atau usaha yang sedang dibangun dan berkembang. Pemanfaatan *digital marketing* memberi keuntungan bagi siapapun yang dapat menggunakannya dengan baik dan efisien. Seperti pada pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di Kelurahan Pakintelan, banyak macam-macam kerajinan yang dapat dihasilkan dan diperkenalkan melalui *digital marketing* agar semakin dikenal khalayak umum. Ini dapat menjadi peluang bagi mereka yang memulai usaha di dunia kewirausahaan. Pada pelaksanaan pemberdayaan di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan, masyarakat tidak mengerti dalam memanfaatkan *digital marketing*, sehingga mereka menjual hasil kerajinan ke toko atau grosir dengan harga yang murah. Kemudian toko dan grosir yang menjual baik secara langsung transaksi langsung di toko maupun online.

Gambar 1. 4 Situasi Pada Saat Pembuatan Kerajinan di Kampung Kerajinan
Bambu dan Rotan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kemudian fenomena terakhir hasil dan keluaran dari pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan yaitu belum terbentuknya kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, belum tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi berbasis potensi lokal yang diangkat, dan belum terciptanya kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik dan tertata. Disisi belum tersedianya *art galeri* guna mendukung pengembangan Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan. Banyak sekali jenis produk yang dihasilkan dari Kampung Kerajinan ini namun tidak ada bukti atau wujud sebagai simbol dari hasil kerajinan yang disimpan di sebuah ruangan. Hal ini akan menjadi sasaran pembangunan selanjutnya yang akan dilakukan Kepala Kelurahan Pakintelan, koordinator dan pengrajin Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan. Apabila pengunjung datang maka ada satu ruangan yang dituju untuk menunjukkan hasil kerajinan yang sudah pernah diproduksi oleh Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan.

Dampak positif dengan adanya Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di Kelurahan Pakintelan yaitu adanya lapangan pekerjaan dengan memenuhi

kebutuhan dasar masyarakat setempat. Adapun kekurangan masyarakat yang telah diketahui yaitu karena minimnya pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian keikutsertaan anak muda dalam program Kampung KRABATAN dapat meningkatkan potensi bidang sosial-ekonomi, dan berpengaruh pada peningkatan kemampuan masyarakat setempat.

Berdasarkan latarbelakang yang sudah dijabarkan dan dianalisis, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut dengan mengedepankan peran manajemen publik untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat terjadi di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan. Berbagai masalah akan sangat minim dalam upaya pemberdayaan masyarakat jika bersifat pasif pada Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan. Harapannya, Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan dapat meningkatkan hasil produksi kerajinan dapat menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat agar terpenuhinya kebutuhan sehari-hari masyarakat dan tidak mengandalkan pekerjaan menjadi buruh. Penulis mencoba melakukan penelitian di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan dengan harapan dapat mengubah masyarakat yang powerless menjadi powerfull dan memperlihatkan bagaimana perubahan positif yang dapat terjadi serta pengembangan masyarakat yang unggul dan potensial di Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul **“Analisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) di Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka didapatkanlah rumusan masalah yang sesuai sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang?
- 2) Apa saja faktor penghambat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini penulis berusaha untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan dari rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk:

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang
- 2) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis/Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan dan menambah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung Kerajinan bambu dan Rotan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian yang berkaitan dengan permasalahan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan sehingga dapat digunakan sebagai referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta informasi yang berguna bagi Pemerintah Kota Semarang khususnya Kelurahan Pakintelan untuk mengevaluasi strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengelola Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan.
- b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terkait kajian Pemberdayaan Masyarakat yang berkaitan dengan aspek sosial budaya dan ekonomi sehingga penelitian ini dapat menjelaskan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperoleh penulis selama mengikuti program pendidikan di Program Studi Administrasi Publik Universitas Diponegoro.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu riset yang dilaksanakan di masa lalu dan dimanfaatkan sebagai rujukan penulis untuk memperkaya teori dalam kajian penelitian. Berdasarkan studi kepustakaan penulis, penelitian yang berjudul analisis pemberdayaan masyarakat melalui program kampung kerajinan bambu dan rotan di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang bersifat baru, dikarenakan belum ada penelitian serupa sebelumnya, akan tetapi, terdapat beragam penelitian terdahulu yang relevan, seperti pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil penelitian
1.	Husnul Yauma Sabta 2022	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses tahapan pengembangan masyarakat dan hasil dari pengembangan masyarakat berbasis Kampung Tematik di Kampung Markisa Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	Penelitian ini menggunakan teori tahapan pengembangan masyarakat yang dikemukakan oleh Zubaedi (2013:85). Dalam pandangan Zubaedi Tahapan pengembangan masyarakat dibagi menjadi enam tahapan yaitu Problem Posing (Pemaparan Masalah), Problem Anlysis (Analisis masalah), Aims and Objectives (Penentuan Tujuan dan Sasaran), Action Plans (Perencanaan Tindakan), Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi di Kampung Markisa Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.	Dalam tahapan perkembangan masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat yang berbasis Kampung tematik pada Kampung Markisa di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dapat dilakukan pada program pelatihan dan pendampingan daur ulang tanaman buah markisa sehingga diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dengan memanfaatkan buah markisa sbagai bahan utama. Namun hasil yang didapatkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2.	Imronah Ainul, Nely Fatmawati 2021	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat dan dampak dari Home Industri Kerajinann Anyaman Bambu terhadap perekonomian masyarakat di Desa Banjarwaru	Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko (2003:100). Dalam pandangan Mardikanto dan Poerwoko Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dalam perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan kemampuan yang sudah dimiliki masyarakat melalui melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seperti Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di Rumah Industri Desa Banjarwaru, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap.	Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industry kerajinan anyaman bambu berdampak pada sektor masyarakat lokal maupun daerah. Home industry Usaha Karya Desa Banjarwaru mengalami kenaikan yang signifikan pada laba bersih yang diterima setiap tahunnya. Hal ini didukung dari upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di home industry kerajinan anyaman bambu seperti upaya bina manusia, upaya bina usaha, upaya bina lingkungan, dan upaya bina kelembagaan.

		Kecamatan Nusawungu.			
3.	Susanto Apri, Dedy Putranto dkk, 2020	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dalam mengurangi limbah botol plastik Kampung Nelayan Kelurahan Tanjung Ketapang.	Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (1999). Dalam pandangan Sumodiningrat Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memandirikan masyarakat melalui potensi yang dimiliki keterlibatan masyarakat dapat dimulai dari perubahan perilaku dalam pemakaian. dan mengolah sampah menggunakan teknik reduce, reuse dan recycle.	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara di Kampung Nelayan Kelurahan Tanjung Ketapang.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan sampah anorganik adalah dengan cara proses daur ulang (recycle). Beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang, misalnya plastik, gelas, logam, dan kertas. Pemanfaatan limbah botol plastik menjadi prakarya bunga yang dijadikan sebagai tempat untuk berfoto merupakan upaya menekan pencemaran limbah plastik di lingkungan Kampung Nelayan dan pendidikan lingkungan hidup.
4.	Arum Tanjung S., Rina Herlina H. 2021	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan program pemberdayaan masyarakat Tunagrahita melalui kerajinan keset di Desa Karangpahitan.	Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Mardikanto (2010). Dalam pandangan Mardikanto pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pada masyarakat (miskin sumberdaya, kaum perempuan, dan kelompok yang terabaikan) agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri melalui tahapan mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah (permasalahan dan peluang), menyusun dan menerapkan rencana kegiatan kelompok, memantau proses hasil kegiatan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi di Desa Karangpahitan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.	Hasil dari penelitian ini bahwa program pemberdayaan tunagrahita ini melalui tiga tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Sedangkan untuk tahapan pertama yaitu tahapan mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah permasalahan serta peluang-peluangnya tidak dilakukan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tunagrahita yang sulit untuk diketahui potensinya serta tujuan dari pemberdayaan tunagrahita disini hanya fokus pada pemandirian masyarakat.
5.	Wahyuningsih Rani, Galih Wahyu Pradana 2021	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan	Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Totok Mardikato (2013: 125-127). Dalam pandangan Mardikanto pemberdayaan masyarakat dapat	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap indikator tahapan pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Lontar Sewu Desa Hendrosari telah dilakukan dan semakin

		masyarakat dapat dilaksanakan menggunakan tahapan pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu di Desa Hendrosari.	dilakukan dengan beberapa proses tahapan yaitu tahap seleksi lokasi, tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat, tahap pemberdayaan masyarakat, dan tahap pemandirian masyarakat.	dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dan observasi di Desa Wisata Lontar Sewu, Desa Hendrosari.	meningkat dan berkembangnya kemandirian serta kreativitas masyarakat Desa Hendrosari, pengelolaan tempat wisata Lontar Sewu yang semakin meningkat, serta sumber daya alam yang ada telah di manfaatkan sebaik mungkin. Peningkatan kemandirian masyarakat dapat dilihat dari terbentuknya berbagai kelompok-kelompok yang diberdayakan.
6	Achmad R. Willya, Siti Anah Kunyanti, Mujiono 2021	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan program CSR (Corporate Social Responsibility) di Desa Panglima Raja Kabupaten Kampar	Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Sulaiman et al. (2019). Dalam pandangan Sulaiman Program yang dapat dikembangkan sebagai program pemberdayaan masyarakat yang berbasis perencanaan partisipatif yaitu program CSR melalui beberapa tahapan yaitu tahap sosialisasi, tahap monitoring, dan tahap evaluasi.	Penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan dengan metode deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi literatur	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan program CSR merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT Syams Arief Shumun dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Pantai Raja di bidang ekonomi, bidang sosial dan lingkungan. Pelaksanaan kegiatan CSR yang terdiri dari tahap sosialisasi, tahap monitoring dan evaluasi, dimana pelaksanaan semua tahapan sesuai dengan prosedur yang dirancang oleh perusahaan dan masyarakat. Namun kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan belum membaik secara signifikan.
7.	Wahyuni Nina Ari, Ahmadi Susilo, Nugrahini Susantinah Wishnujati 2022	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan penerapan ekonomi sirkular pada proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Porgram CSR PT	Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Ramada et al. (2020). Dalam pandangan Ramada Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang diarahkan dengan berupa peningkatan kemampuan dan daya masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran, kemampuan dan peluang	Penelitian ini menggunakan deskriptif Kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah menerapkan ekonomi sirkular, petani kelompok telah terampil memanfaatkan limbah bawang merah berkualitas rendah menjadi bumbu masakan siap santap dan menjadi hasil olahan khas desa dan menghasilkan nilai ekonomi Rp. 8.488.000,00 sekali panen periode. Dengan demikian upaya penyelamatan limbah bawang merah berkualitas rendah memberikan manfaat

		Paiton Energy kepada kelompok tani.			dalam meningkatkan pendapatan petani bawang merah grup.
8.	Hidayati Dewi A., Tina Kartika, Mohammad Muhassin 2021	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat berbasis budidaya air di Desa Banding Agung	Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Raharja dan Kutaneegara (2019). Dalam pandangan Raharja dan Kutaneegara pemberdayaan masyarakat dapat mendorong masyarakat lokal untuk memiliki kemampuan dan mengasah sumber daya manusia yang dimiliki untuk terlibat penuh dalam produksi, ekonomi, sosial dan mekanisme ekologis. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa strategi yaitu membangun kesadaran masyarakat, membangun kapasitas kelembagaan, dan menempatkan pengetahuan, keterampilan dan praktek anggota kelompok.	Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa strategi telah diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kegiatan budidaya ikan air tawar, antara lain membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), membangun kapasitas kelembagaan melalui pendidikan, pelatihan dan lokakarya pengelolaan budidaya ikan, dan mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok. Dalam pelaksanaan strategi tersebut ditemukan beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat pemberdayaan masyarakat, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya pengetahuan dan modal, minimnya pendampingan dan penyuluhan, serta kurangnya keterlibatan pemerintah desa.
9.	Purnomo Singgih, Endang Siti Rahayu, Asri Laksmi Riani, Suminah, Udin 2020	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata berkelanjutan di Indonesia.	Penelitian ini menggunakan teori pembangunan berkelanjutan (Kementerian Pariwisata, 2019). Pembangunan berkelanjutan haruslah dibarengi dengan kekuatan lingkungan, sehingga dapat mendorong adanya kekuatan pembangunan guna menciptakan lingkungan, ekonomi berkelanjutan agar terwujudnya masyarakat yang produktif. Dalam pembangunan berkelanjutan maka dibutuhkan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan FDG	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengembangan pariwisata yang dilakukan di Desa Ponggok menggunakan empat pendekatan (1) pendekatan spasial sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan desa; (2) pendekatan sektoral melalui peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa untuk membangun perekonomian desa; (3) sumber daya manusia untuk meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola potensi desa; dan (4) pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan

			pendekatan spasial, pendekatan sektoral, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi.		akuntabilitas. Keberhasilan keempatnya pendekatan dipengaruhi oleh kepemimpinan, inovasi, kolaborasi, dan tata kelola desa yang baik.
10.	Irwan, Andi Agustang, Arlin Adam, Ambo Upe 2021	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Desa Bira untuk Menjadi Pedesaan Berbasis Masyarakat Berkelanjutan Pariwisata berdasarkan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat	Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan Weber (Veeger, 1986) dan konsep menurut Ife dan Tesoriero (2008). Dalam pandangannya Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang kurang beruntung. Strategi yang digunakan dapat melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, pendidikan dan kesadaran.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan di desa ini untuk mendukung terwujudnya Desa Bira sebagai Pedesaan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Pariwisata (SRCBT). Konsep ini merupakan integrasi dari konsep desa wisata, community based tourism, dan pariwisata berkelanjutan dalam satu batas Pariwisata Berbasis Masyarakat Pedesaan Berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Analisis Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan (KRABATAN) di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang menggunakan beberapa karya ilmiah berupa penelitian atau jurnal terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan topik penelitian penulis. Penulis menggunakan acuan dari penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama diambil dari penelitian Husnul Yauma Sabta (2022) yang membahas mengenai Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung Tematik di Kampung Markisa Kecamatan Karawaci. Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat seperti Problem Posing (Pemaparan Masalah), Problem Anlysis (Analisis masalah), Aims and Objectives (Penentuan Tujuan dan Sasaran), Action Plans (Perencanaan Tindakan), Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat tertib, mematuhi setiap aturan yang berlaku dan terarah. Penelitian ini mengangkat permasalahan pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah cukup tertib dan terarah namun kegiatan pemberdayaan ini belum dapat menurunkan jumlah masyarakat miskin dikarenakan hasil yang diperoleh belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan hanya membantu memenuhi saja. Disisi lain pemberdayaan ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah teori yang digunakan pada penelitian ini adalah menurut Zubaedi

(2013:85) dengan 6 tahapan pemberdayaan masyarakat yang fokusnya pada fenomena di kampung markisa sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:3-6) dengan 3 tahapan pemberdayaan masyarakat yang lebih berfokus pada pengenalan lingkungan dan potensi yang dimiliki, mengadakan pelatihan dan sosialisasi, modal baik secara materi maupun non materi guna menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kampung kerajinan bambu dan rotan.

Penelitian kedua diambil dari penelitian yang dilakukan Ainul Imronah, Nely Fatmawati (2021) yang membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengetasan kemiskinan melalui home industri kerajinan anyaman bambu. Penelitian ini menggunakan beberapa upaya-upaya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan. Hasilnya masyarakat memiliki potensi dalam membuat kerajinan bambu dan menerapkan upaya-upaya tersebut dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga pemberdayaan ini memberikan dampak positif pada masyarakat daerah seperti minimnya jumlah pengangguran, peningkatan kebutuhan dasar atau sehari-hari masyarakat, dan peningkatan produksi anyam untuk bidang ekonomi masyarakat setempat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada penelitian ini pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kegiatan kerajinan bambu sedangkan pada penelitian saat ini pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kegiatan kerajinan bambu dan rotan. Selanjutnya upaya yang dilakukan pada proses pemberdayaan pada penelitian ini menggunakan teori dari Totok Mardikanto dan Poerwoko (2003:100) dengan 4

upaya sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:3-6) dengan 3 tahapan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ketiga diambil dari penelitian yang dilakukan Susanto Apri, Dedy Putranto dkk (2020) yang membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah dan mengurangi limbah botol plastik Kampung Nelayan Kelurahan Tanjung Ketapang. Akar masalah dalam penelitian tersebut yaitu pengelolaan sampah di daerah pantai, sungai ataupun dibakar sepenuhnya sehingga lingkungan tercemar dan masyarakat (nelayan) merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hasilnya dianalisis mengenai pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan langsung masyarakat dalam meningkatkan potensi yaitu perubahan perilaku masyarakat dan mengolah sampah menggunakan teknik 5R (*refuse, reduce, reuse dan recycle, rot*). (Sumodiningrat, 1999). Adapun limbah botol plastic dijadikan keragaman hiasan untuk berfoto dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan di Kampung Nelayan. Perbedaan penelitian ini dengan peneitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada penelitian ini pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan limbah plastik untuk mengurangi pencemaran dengan menggunakan 3 teknik mengolah sampah sedangkan pada penelitian saat ini pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat dan meningkatkan pengetahuan mengenai kerajinan bambu dan rotan dalam mengurangi kemiskinan di lingkungan masyarakat.

Penelitian keempat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Tanjung Sekar Arum dan Rina Herlina Haryanti (2021) yang membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui kerajinan keset di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong

Kabupaten Ponorogo. Akar masalah penelitian ini mengenai yang terjadi pada masyarakat tunagrahita yang rentan diskriminasi sehingga dilakukan beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hasilnya dianalisis mengenai program pemberdayaan tunagrahita dengan mengidentifikasi potensi apa yang dimiliki masyarakat setempat, kemudian dilakukan pelatihan yang menarik dan dilanjutkan dengan tahapan hasil kegiatan berupa kreasi dari keset. Perbedaan penelitian ini dan penelitian saat ini adalah pada penelitian ini pemberdayaan masyarakat terjadi pada masyarakat tunagrahita berupa kerajinan keset dengan menggunakan beberapa tahapan menurut Mardikanto (2010). Sedangkan penelitian saat ini pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan potensi yang dimiliki dan dikembangkan melalui beberapa tahapan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:3-6).

Penelitian kelima diambil dari penelitian Rani Wahyuningsih, Galih Wahyu Pradana (2021) yang membahas mengenai Pemberdayaan masyarakat Desa Hendrosari melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. Dalam proses pengembangan desa terdapat beberapa proses tahapan seperti tahap seleksi lokasi, tahap sosialisasi pemberdayaan masyarakat, tahap pemberdayaan masyarakat, dan tahap pemandirian masyarakat (Totok Mardikato, 2013: 125-127). Hasilnya dianalisis memberikan dampak positif pada kemandirian masyarakat dalam mengelola tempat wisata Lontar Sewu. Salah satu upaya yang paling menonjol peningkatannya yaitu masyarakat setempat membentuk kelompok yang dapat diberdayakan dalam keberlangsungan potensi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada penelitian ini bertujuan untuk

mengembangkan desa berbasis desa wisata dan mencakup 2 aspek masyarakat dan kemitraan sedangkan pada penelitian saat ini bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat desa dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kerajinan bambu, rotan dan mencakup 5 aspek yaitu masyarakat, pemerintah, komunitas, media dan praktisi/bisnis.

Penelitian keenam diambil dari penelitian yang dilakukan oleh R Willya Achmad W , Siti Anah Kunyanti , Mujiono (2021) yang membahas mengenai Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panglima Raja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah taraf kemiskinan yang masih luas dan kesejahteraan yang rendah di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PT Syams Arief Shumun dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Pantai Raja dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini berupa kegiatan pendampingan masyarakat dimana pemahaman masyarakat ditingkatkan dalam memanfaatkan program CSR untuk meningkatkan kesejahteraan, difasilitasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan di masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terdapat kerjasama antara masyarakat dan perusahaan dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pada penelitian ini berbasis perencanaan partisipatif sedangkan pada penelitian saat ini masyarakat bekerjasama dengan toko dalam menjual hasil kerajinan bambu dan rotan, pemberdayaan masyarakat dilakukan berbasis kampung tematik.

Penelitian ketujuh diambil dari penelitian Nina Ari Wahyuni,dkk (2020) yang membahas mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Limbah Bawang Merah Program untuk Menciptakan Ekonomi Sirkular. Akar masalah penelitian ini meliputi banyaknya limbah bawang merah yang berkualitas rendah dan mayoritas masyarakat bermata pencaharian pada yang memiliki pendapatan yang tidak menentu sehingga berinisiatif membangun sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bekerjasama dengan PT Paiton Energy. Dalam proses pemberdayaan terdapat proses yang diarahkan berupa peningkatan kemampuan dan daya masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran, kemampuan dan peluang (Ramada et al. 2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah menerapkan ekonomi sirkular, petani kelompok telah terampil memanfaatkan limbah bawang merah berkualitas rendah menjadi bumbu masakan siap santap dan menjadi hasil olahan khas desa dan menghasilkan nilai ekonomi yang memuaskan untuk sekali panen periode. Dengan demikian upaya penyelamatan limbah bawang merah berkualitas rendah memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan petani bawang merah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada penelitian ini proses pemberdayaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan mengolah limbah dengan bekerjasama pada perusahaan sehingga masyarakat dapat terbantu sedangkan penelitian saat ini hanya mengandalkan potensi yang dimiliki masyarakat dan bekerjasama dengan toko yang dimana membantu dalam proses penjualan hasil kerajinan.

Penelitian kedelapan diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ayu Hidayat (2021) yang membahas mengenai strategi pemberdayaan masyarakat desa berbasis Budidaya air tawar. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini mengenai rendahnya keterlibatan masyarakat, minim pengetahuan serta tidak adanya alokasi bantuan dari pemerintah setempat dalam penanggulangan masalah. Hasilnya dianalisis bahwa strategi yang dapat dilakukan dari masalah tersebut dengan pemberdayaan masyarakat dalam budidaya ikan air tawar. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi serta pengembangan kreativitas masyarakat mengenai budidaya ikan. Adapun yang menjadi perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah memanfaatkan sumber daya air yang melimpah sedangkan pada penelitian saat ini tidak memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah melainkan memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat.

Penelitian kesembilan diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Singgih Purnomo, dkk (2020) yang membahas mengenai Model Pemberdayaan Desa Wisata Berkelanjutan di Negara Berkembang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kerusakan alam akibat pengelolaan destinasi wisata yang tidak berkelanjutan. Tujuan penelitian ini menganalisis pemberdayaan masyarakat setempat dalam pengembangan desa wisata di Indonesia (Purnomo et al., 2020). Hasilnya dianalisis mengenai pengembangan pariwisata yang dilakukan di Desa Pongkok dalam empat pendekatan meliputi pendekatan dalam penentuan arah pembangunan, pendekatan dalam peningkatan BUMD bidang ekonomi, pendekatan peran dan keterlibatan masyarakat setempat, serta pendekatan dalam

pemanfaatan kualitas layanan, transparansi dan akuntabilitas. Adapun keberhasilan dalam program pendekatan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek antara lain kepemimpinan, adanya kolaborasi, serta tata kelola desa yang baik. Dengan demikian dampak positif pun tercipta melalui kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan metode focus group discussion dan konsep penelitian untuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sedangkan pada penelitian saat ini tidak menggunakan metode focus group discussion dan juga fokus pada penganggualangan kemiskinan.

Penelitian kesepuluh diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Irwan, dkk (2021) yang membahas mengenai Strategi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Berbasis Masyarakat Pedesaan yang Berkelanjutan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam keberlanjutan pariwisata di Desa ini cukup terabaikan dan jumlah penduduk miskin yang masih banyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Desa Bira untuk Menjadi Pedesaan Berbasis Masyarakat Berkelanjutan Pariwisata berdasarkan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat (Irwan & Agustang, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan di desa ini untuk mendukung terwujudnya Desa Bira sebagai Pedesaan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Pariwisata (SRCBT). Konsep ini merupakan integrasi dari konsep desa wisata, community based tourism, dan pariwisata berkelanjutan dalam satu batas Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pedesaan Berkelanjutan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penelitian terdahulu menganalisis potensi desa menjadi pedesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan implementasi konsep pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian saat ini hanya menganalisis potensi masyarakat menjadi kampung tematik yang memberdayakan masyarakat kampung kerajinan bambu dan rotan.

1.5.2 Paradigma Administrasi Publik

Chandler & Plano, dikutip dalam Yeremias T (2014) mengemukakan bahwa administrasi publik merupakan proses adanya sumberdaya dan personel public dikoordinasikan untuk implementasi manajemen keputusan kebijakan publik. Administrasi publik dilakukan dengan tujuan mengatur public affairs. Tujuannya untuk memecahkan masalah public baik dalam perbaikan maupun peningkatan dalam memecahkan masalah publik dalam bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Administrasi publik juga disebut dengan proses politik dengan memerintahkan suatu negara dengan menjalankan fungsi negara itu sendiri (Mc Curdy dalam Yeremias T: 2014). Administrasi publik meliputi persoalan manajemen dan publik serta menjadi pengembangan dunia politik (Keban, 2014). Nicholas Henry dalam Yeremias T (2014:31) mengungkapkan bahwa standar suatu disiplin ilmu, seperti yang dikemukakan oleh Robert T. Golembiewski, mencakup focus dan locus. Fokus mempersoalkan what of the field atau metode dasar yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan locus mencakup where of the field atau tempat dimana metode diterapkan. Berdasarkan dua kategori tersebut, maka terdapat lima paradigma dalam administrasi publik, diantaranya:

Paradigma 1 (1900-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. J. Goodnow dalam tulisannya yang berjudul “Politics and Administration” tahun 1900 yang menegaskan bahwa politik akan berpihak pada kemauan rakyat, namun administrasi dapat berpihak pada pengembangan potensi dari ketentuan dan aturan dari politik yang dimaksud. Adapun implikasi tersebut meliputi pembebasan nilai bersyarat sehingga dapat dirumuskan untuk tercapainya nilai pada bidang ekonomi. Namun paradig ini kurang menegaskan pada pengembangan administrasi publik sehingga kurang dibahas secara jelas.

Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Tokoh-tokoh penting seperti Willoughby, Gullick & Urwick, Fayol dan Taylor mengemukakan bahwa aturan maupun prinsip administrasi dapat disebut sebagai terencana (planning), terorganisir (organizing), kepegawaian (staffing), pengarahan (directing), koordinasi (coordinating), laporan (reporting), dan anggaran (budgeting) yang dapat dilakukan kapan saja. Namun lokus dari administrasi tidak dilakukan secara terarah karena prinsip yang dimaksud berlaku kapan dan dimana saja termasuk organisasi pemerintahan sehingga paradig ini lebih focus pada focus daripada lokus.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Administrasi Negara dapat berlaku dimana saja dalam nilai-nilai tertentu. Adapun pertentangan yang dapat terjadi karena value free administration pada satu pihak akan ada anggapan bahwa adanya value-laden politics di pihak lain. John Gaus berpendapat bahwa teori mengenai administrasi masih bagian dari teori

politik. Dampak negatifnya adalah adanya anggapan bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik dengan bidang birokrasi pemerintahan dan melenceng dari prinsip administrasi publik. Adapun masa tersebut dapat mengalami penyimpangan dari prinsip administrasi karena ilmu politik yang lebih dominan.

Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik merupakan cabang dari ilmu administrasi. Prinsip dalam paradig ini perkembangan manajemen secara ilmiah dan mendalam. Adapun focus dari paradig ini adalah perilaku organisasi, manajemen, teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis system, riset, dan operasi. Terjadi perkembangan pada orientasi pengembangan ilmu administrasi murni yaitu adanya bidang psikososial yang masih merujuk pada administrasi murni. Namun rujukan tersebut dapat diimplementasikan dalam bidang bisnis dan administrasi publik. Dengan demikian lokusnya menjadi tidak terarah.

Paradigma 5 (1970-sekarang) menyebutkan bahwa administrasi publik dikatakan sebagai administrasi publik. Adapun focus dari paradigma ini meliputi focus dan lokus yang jelas yaitu mulai dari terorganisir, adanya manajemen serta peraturan kebijakan mengenai publik. Lokus paradigma ini yaitu kepentingan publik.

Paradigma 6 (1990-sekarang) adalah Good Governance. Good governance di Indonesia muncul di era reformasi. Pada masa itu lahirlah tuntutan keadaan pada pemerintahan era Orde Baru meliputi permasalahan konstitusi dan kekuasaan

pemerintah seperti disfungsi lembaga tinggi Negara dan dispartisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada paradigma ke-5 (lima) yaitu Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, paradigma ke-5 ini memiliki focus dan lokus yang jelas meliputi focus organisasi, manajemen dan kebijakan publik. Sementara lokusnya akar masalah dan kepentingan publik. Penulis meneliti topik pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik yaitu kampung kerajinan bambu dan rotan sehingga membutuhkan focus pada manajemen publik dan lokus pada kepentingan dan kesejahteraan publik.

1.5.3 Manajemen Publik

James AF Stoner (Handoko, 2008: 8) menyebutkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan maka diperlukan adanya manajemen dalam proses perencanaan, secara organisir, dan penggunaan adanya sumber daya. Menurut George R. Terry fungsi dari manajemen ditegaskan bahwa adanya desain program dan restruksisasi organisasi, manajemen keuangan, serta pemanfaatan sumber daya untuk mencapai program (Ott, Hyde & Shafritz dalam Wijaya, 2014). Dengan demikian manajemen public memiliki keterkaitan dengan fungsi manajemen kelompok maupun individu.

Garson & Overman (dalam Keban, 2014: 107) mengungkapkan dalam organisasi publik pendekatan PAFHRIER mendapat perhatian dalam rangka manajer sebagai pihak yang melayani publik. Fungsi-fungsi manajemen berdasarkan doktrin PAFHRIER salah satunya adalah manajemen kebijakan Manajer dalam proses kebijakan secara aktif dalam penentuan program-program yang diusulkan dan ditangani dalam tahun anggaran tertentu. Manajer harus aktif

membahas berbagai kelemahan dan kesulitan implementasi kebijakan tahun-tahun sebelumnya untuk penyusunan program pada tahun berikutnya. Koordinasi yang baik, tanpa tumpang tindih, dan tidak melakukan tindakan ganda adalah suatu kunci. Manajemen public dapat memberikan dampak positif pada kebijakan pada aspek teknis dan aspek politik.

Manajemen public penelitian ini dapat mendukung kegiatan pemerintah dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan focus manajemen publik.

1.5.4 Pemberdayaan Masyarakat

Maryani (2019) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses pelibatan masyarakat dengan tujuan mengoptimalkan kondisi tertentu. Mardikanto dan Soebianto (2019:100) menegaskan bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat meliputi perubahan pada kehidupan sosial, politik, ekonomi dengan beberapa sehingga tercapai tujuan perubahan perilaku dari beberapa pembentukan stakeholders. Pemberdayaan berarti mendayagunakan masyarakat yang sebelumnya powerless menjadi powerfull. Mardikanto (dalam Maryani, 2019: 8) menjelaskan terdapat enam tujuan dalam pemberdayaan masyarakat:

1. Perbaikan Kelembagaan

Perbaikan kelembagaan dengan memperbaiki kemitraan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat. Adapun kelembagaan yang baik dengan visi misi dan tujuan yang jelas sehingga adanya ketercapaian program kerja. Masing-masing anggota kelembagaan juga harus memiliki rasa saling motivasi dan mengembangkan pengetahuan.

2. Perbaikan Usaha

Perbaikan usaha yang dimaksud merupakan masyarakat akan mendapatkan dampak positif karena mendapatkan kebutuhan dasar yang lebih optimal dari sebelumnya. Setelah perbaikan kelembagaan, terciptalah perbaikan usaha.

3. Perbaikan Pendapatan

Perbaikan bisnis bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan seluruh anggota dan merupakan kelanjutan dari perbaikan usaha.

4. Perbaikan Lingkungan

Perbaikan lingkungan yang dimaksud adanya perbaikan kehidupan lingkungan sekitar seperti kebutuhan lingkungan rumah yang asri dan terciptanya individu dengan wilayah yang lebih optimal.

5. Perbaikan Kehidupan

Perbaikan kehidupan dapat dilihat dari aspek peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masing-masing keluarga.

6. Perbaikan Masyarakat

Perbaikan masyarakat yang dimaksud meliputi perbaikan lingkungan baik individu secara fisik maupun keompok secara sosial yang lebih baik.

1.5.5 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Aspek terpenting dalam pemberdayaan masyarakat ialah proses yang dapat dikatakan juga sebagai tahapan. Adapun tahapan-tahapan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dinilai melalui kondisi, kemampuan dan respon dari masyarakat. Sumodiningrat (2002) menegaskan bahwa memberdayakan masyarakat dilihat dari tiga sisi yaitu menciptakan perkembangan, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat, dan memberdayakan masyarakat.

Berikut rincian dari tahapan kegiatan pemberdayaan dengan metode pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan dalam Tabel 1.3

Tabel 1. 3 Metode Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tahapan kegiatannya

No.	Tahapan Kegiatan	Ragam Metode Yang Disarankan	Keterangan
1.	Penetapan dan pengenalan wilayah kerja	Pertemuan Diskusi, FDG, Lokakarya	Semua pemangku Kepentingan
2.	Sosialisasi Kegiatan	Percakapan, Media-massa, Media cetak, pertemuan, FDG	Semua pemangku Kepentingan
3.	Penyadaran Masyarakat	Percakapan, Media-massa, Media cetak, pertemuan, FDG, RRA, PRA	Birokrasi, Fasilitator, tokoh masyarakat, LSM
4.	Pengorganisasian masyarakat	Percakapan, pertemuan, Lokakarya, FDG, anjangan, anjang karya	Birokrasi, Fasilitator, tokoh masyarakat, LSM
5.	Pelaksanaan kegiatan	Pelatihan, percakapan, anjangan, anjang karya, sekolah lapang, PLA, Diskusi, FDG, Lokakarya	Birokrasi, Fasilitator, LSM
6.	Advokasi Kebijakan	Percakapan, FDG, Pertemuan, Lokakarya, anjang karya	Semua pemangku kepentingan
7.	Politisasi	Media cetak, media massa, pertemuan, PLA, FDG, Lokakarya	Semua pemangku kepentingan

Sumber: (Mardikanto & Soebianto, 2019)

Nina Mintarti dalam (Habibah, 2009: 18-19) menegaskan bahwa adanya tahapan pemberdayaan sebagai berikut:

1. Penyadaran

Tahap penyadaran meliputi mengembangkan potensi serta membantu komunitas dari berbagai aspek.

2. Pengorganisasian

Tahap organisasi meliputi rasa sukarela dalam pembentukan program yang terorganisir.

3. Kaderisasi

Tahapan ini adalah pemilihan kader dalam pengoptimalan pendampingan program. Adapun kader yang dipilih merupakan hasil pemilihan masyarakat setempat.

4. Dukungan teknis

Tahap dukungan teknis meliputi proses produksi program pemberdayaan.

5. Pengelolaan Sistem

Tahap pengelolaan sistem meliputi kebutuhan individu atau kelompok.

Tahapan pemberdayaan dijelaskan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:3-

6) menjadi tiga tahapan pemberdayaan:

1. Tahap Penyadaran

Tahap ini meliputi kesadaran dalam memiliki kemampuan yang dimulai dari diri individu itu sendiri.

2. Tahap pengkapasitasan

Tahap ini meliputi terbentuknya ketertarikan atau kesadaran masyarakat yang tereduksi dengan baik.

3. Tahap Pendayaan.

Tahap ini meliputi tahap terakhir dengan memberikan aspirasi untuk dilakukan evaluasi hasil program yang dibentuk.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya diketahui bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat sangat beragam Tahapan diawali dengan kesadaran untuk berdaya secara sukarela baik secara individu, kelompok, dan lembaga dan diakhiri dengan tahap dapat secara utuh memandirikan masyarakat untuk lebih powerful sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Pada

penelitian ini dalam menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui kampung kerajinan bambu dan rotan menggunakan tahapan pemberdayaan yang meliputi tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.

1.5.6 Faktor Penghambat

Faktor penghambat dapat diteliti menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penggunaan model implementasi kebijakan ini didasarkan pada prinsip evaluasi program itu sendiri, sebagai bahan acuan dalam menentukan keberlanjutan program. Model implementasi yang dikemukakan Edwards memuat empat konsep yang memengaruhi implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi memiliki keterkaitan pada pihak yang berkaitan yang terlibat. Hal tersebut dilakukan agar kebijakan program tersebut dapat dipahami antar pihak yang terlibat baik implementor maupun kelompok sasaran. Tiga fenomena dalam melihat konsep komunikasi antara lain konsistensi, transmisi, dan kejelasan informasi.

b. Sumberdaya

Sumberdaya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dukung untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas.

c. Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik meliputi kerjasama komitmen dan sifat yang mendukung dalam implementasi kebijakan.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi meliputi prosedur dan struktur birokrasi itu sendiri. Prosedur menjadi pedoman wajib implementor dalam melaksanakan kebijakan, sehingga tidak melenceng dari tujuan Struktur birokrasi yang panjang dapat menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan

Arini dan Rostyaningsih (2018) pada penelitiannya menyebutkan faktor pendorong dan penghambat program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- a. Sosialisasi
- b. Partisipasi masyarakat
- c. Peran pendamping
- d. Kondisi dan pemakaian sarana dan prasarana

1.5.7 Kampung Tematik

Gerakan Bersama Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran melalui Keserasian Ekonomi, Pendidikan, Ekosistem dan Etika Masyarakat (Gerbang Besar) dalam RPJMD Inovasi 2016-2021 merupakan salah satu program kampung tematik. Subjek dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 22 Tahun 2018 adalah wilayah di bawah kendali kecamatan yang menunjukkan identitas kotamadya. Kampung tematik merupakan salah satu strategi program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Pembentukan kampung tematik memiliki tujuan pelaksanaan yaitu memperbaiki dan mengatasi beberapa hal meliputi minimalisir kemiskinan, memperbaiki lingkungan yang kumuh, peningkatan keterlibatan

masyarakat, peningkatan potensi masyarakat, peningkatan kepedulian masyarakat, memberikan motivasi bagi kampung-kampung lain, peningkatan ekonomi wilayah serta menambah destinasi wisata.

Perwal Nomor 22 Tahun 2018 Kota Semarang memaparkan capaian dan hasil pembentukan kampung tematik. Hasil dari dibentuknya kampung tematik yaitu semakin peduli masyarakat dengan lingkungannya, peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dalam bidang perekonomian, dan terbentuknya lingkungan hidup yang sehat dan tertata rapi melalui perbaikan jalan yang memadai dan saluran irigasi yang sudah siap sedia.

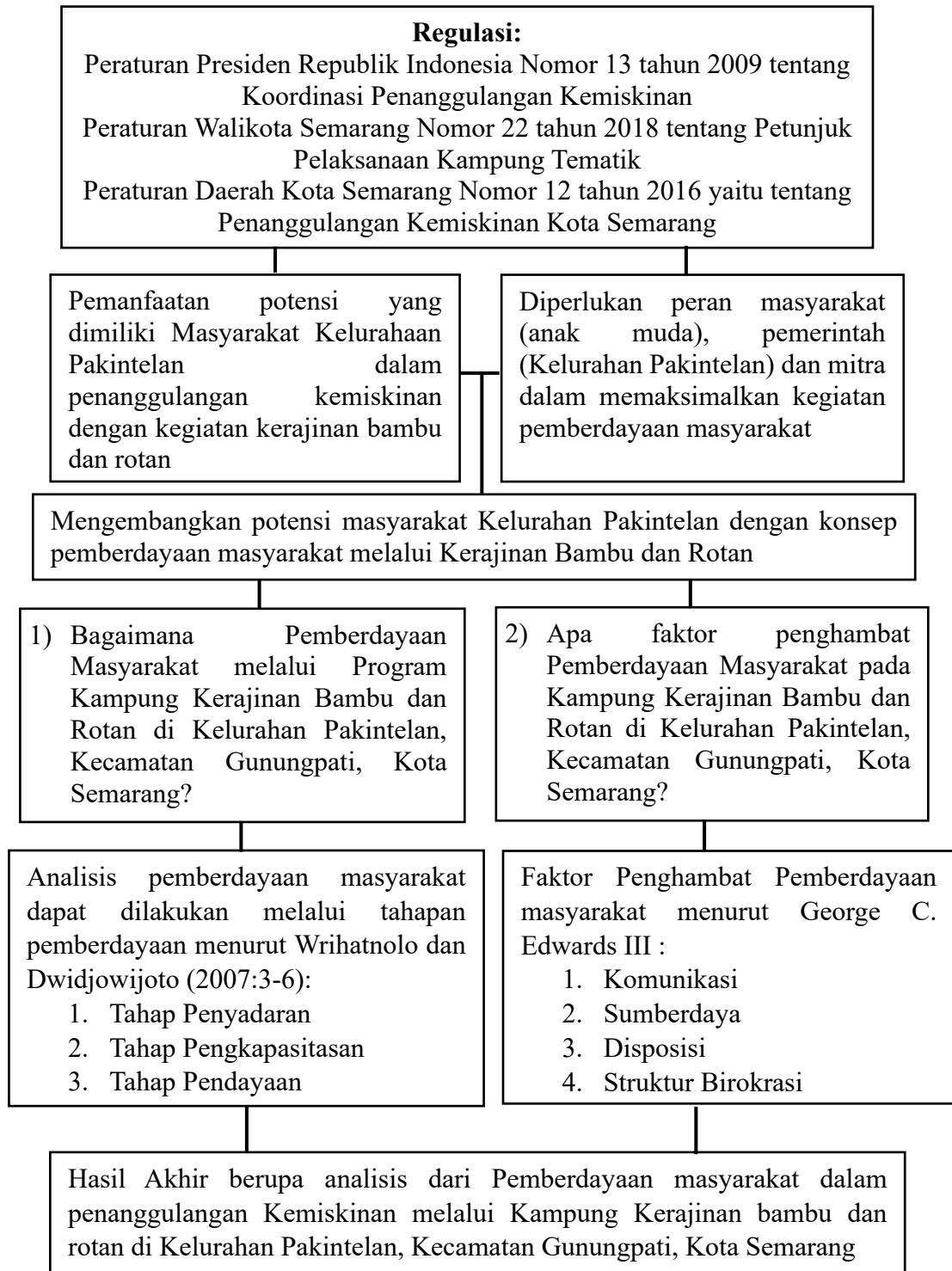
Pada dasarnya kampung tematik akan berdampak pada ekonomi, edukasi, ekosistem dan etos Ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Edukasi masyarakat berkaitan dengan masyarakat memahami karakteristik wilayah, memetakan dan mengangkat potensi yang ada. Ekosistem berkaitan dengan mengidentifikasi potensi dan permasalahan lingkungan permukiman dengan memberdayakan masyarakat setempat. Etos yang berkaitan dengan sikap, karakter, dan semangat gotong royong masyarakat untuk peduli membangun dan merawat lingkungannya. Pembentukan kampung tematik Kota Semarang diawali melalui Bappeda untuk mempertimbangkan potensi lokal sebagai karakter kampung tematik dengan tujuan segala potensi yang tersedia dan dapat mendukung kampung tersebut harus dikembangkan agar masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat teratasi dengan baik dan benar.

Program Kampung Tematik di Kota Semarang diketahui dari tahun 2016 (32 kampung), tahun 2017 (80 kampung), tahun 2018 (65 kampung), tahun 2019 (32

kampung), tahun 2020 (26 kampung), tahun 2021 (15 kampung), dan tahun 2022 (10 kampung). Dengan demikian tahun 2022 memiliki 260 kampung tematik dalam 177 Kelurahan di kota Semarang yang artinya satu kelurahan terdapat minimal satu kampung tematik atau lebih berdasarkan potensi masing-masing daerah (Bappeda 2017).

1.6 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1. 5 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Penulis

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 4 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Fenomena
<p>Pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan adalah salah satu kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mengubah masyarakat powerless menjadi powerfull melalui tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.</p>	<p>Analisis pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di kelurahan pakintelan Kota Semarang:</p> <p>a. Tahap Penyadaran adalah langkah yang dapat dilakukan dengan memberikan kesadaran pada masyarakat terkait kondisi lingkungan seperti potensi dan permasalahannya.</p> <p>Fenomena yang diamati adalah sosialisasi mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan dan ketertarikan masyarakat khususnya anak muda untuk berpartisipasi dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>b. Tahap Pengkapasitasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk diberdayakan kecakapannya dalam mengelola serta menggali kemampuan masyarakat agar lebih terampil dan mampu mengambil peluang.</p> <p>Fenomena yang diamati adalah Pelatihan kepada para pengrajin dan masyarakat dan penurunan bantuan dari pemerintah.</p> <p>c. Tahap Pendayaan adalah tindakan-tindakan yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat.</p> <p>Fenomena yang diamati adalah Pengembangan Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan dan tercapainya keluaran dari pemberdayaan</p>

	<p>masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. 2. Tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi berbasis lokal yang diangkat. 3. Tercapainya kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik dan tertata dengan terwujudnya prasarana seperti jalan yang kondisinya lebih baik.
<p>Adapun faktor penghambat pada pemberdayaan masyarakat melalui kampung kerajinan Bambu dan Rotan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.</p>	<p>Adapun faktor penghambat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada pihak lain dan bagaimana sikap dan tanggapan pihak-pihak yang terlibat (implementor dan kelompok sasaran) b. Sumberdaya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dukung untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas. c. Disposisi merupakan sikap atau karakteristik implemetor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis dalam mengimplementasikan kebijakan. d. Struktur birokrasi meliputi prosedur dan struktur birokrasi sendiri.

Sumber: Penulis

1.8 Argumentasi Penelitian

Penelitian ini menganalisis tentang pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik yaitu Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan. Kampung Tematik merupakan strategi dalam program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan potensi masyarakat sehingga tidak akan ada lagi kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka menuju kehidupan yang sejahtera. Konsep Pemberdayaan masyarakat ada dikarenakan kegagalan di masa lalu sekaligus harapan di masa depan. Adapun kegagalan ini berupa tidak berlangsungnya sector ekonomi dalam penanggulangan kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat terjadi dari berbagai faktor internal maupun eksternal seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dasar-dasar pemberdayaan masyarakat, pengetahuan dan keterampilan yang cukup rendah, kesejahteraan masyarakat yang rendah, kurangnya menjalin komunikasi dengan pemerintah dan mitra, sarana dan prasarana yang belum memadai, partisipasi masyarakat terutama anak muda yang masih rendah, potensi masyarakat yang tidak diasah dan desa yang belum banyak diketahui masyarakat, masyarakat yang belum menyadari pentingnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, partisipasi pemerintah dan bantuan untuk masyarakat yang masih rendah dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Permasalahan ini juga ditemukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan

di Kelurahan Pakintelan, yaitu pelaksanaan pemberdayaan Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan masih perlu pembenahan agar dapat terorganisasi secara baik dan benar, kondisi lingkungan pemukiman yang nyaman sebagai poin penting dalam penunjang terlaksananya kegiatan Kampung Kerajinan bambu dan Rotan yang juga jauh dari kata sempurna, pembaharuan peta sebagai gambaran untuk menuju Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan, minimnya sosialisasi sehingga menimbulkan kurangnya ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan, tidak adanya pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM, tidak adanya bantuan/partisipasi pemerintah Kelurahan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan media sosial untuk memperkenalkan hasil kerajinan bambu dan Rotan.

Penelitian ini akan menganalisis hal-hal yang menjadi sumber permasalahan pemberdayaan masyarakat di kampung Kerajinan Bambu dan Rotan Kelurahan Pakintelan dan akan membahas kerangka konseptual penelitian yang akan membantu penulis menyelesaikan permasalahan ini. Penulis mengambil konsep pemberdayaan masyarakat dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang perlu diberdayakan melihat dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa tahapan yang diantaranya tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan.

1.9 Fenomena Penelitian

Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan di Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk upaya penanggulangan kemiskinan dengan mendukung setiap kebijakan-

kebijakan/program yang dilakukan pemerintah Kota Semarang sehingga tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat Kota Semarang terutama masyarakat Kelurahan Pakintelan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan potensi dan peluang yang dimiliki masyarakat tersebut dapat semakin terasah dan terbuka. Masyarakat dengan bantuan pemerintah dapat mengembangkan potensi yang dimiliki seperti membuat kerajinan dari bambu dan rotan, kemudian setelah terbentuk masyarakat dapat bekerjasama dengan mitra atau toko dalam mempromosikan dan menjual hasil dari tersebut. Hal ini untuk dapat memberikan pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Kelurahan Pakintelan. Sebagai bagian dari inisiatif yang disponsori pemerintah untuk menstimulasi perekonomian lokal dan melestarikan kearifan lokal melalui pengelolaan potensi yang efektif, kampung kerajinan bambu dan rotan menjadi salah satu kampung tematik di kota Semarang. Analisis Pemberdayaan masyarakat pada Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan dapat ditinjau dari tahapan pemberdayaan, diantaranya:

a) Tahap Penyadaran

Sosialisasi mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan agar tidak timbul masalah baru seperti kurangnya ketertarikan masyarakat khususnya anak muda untuk berpartisipasi dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b) Tahap Pengkapasitasan

Pengadaan pelatihan sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk dapat mempertahankan ciri khas daerahnya dan penurunan bantuan dari pemerintah agar menunjang keberjalanannya pemberdayaan masyarakat.

c) Tahap Pendayaan

Pengembangan Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan, salah satunya dengan cara memperkenalkan media sosial sebagai sarana untuk memperkenalkan produk ke dunia luar dan dapat meningkatkan hasil penjualan. Dan tercapainya keluaran dari pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan yang meliputi terbentuknya kepribadian perilaku masyarakat, tercapainya kesejahteraan rakyat, dan tercapainya lingkungan masyarakat seperti jalanan umum dalam kondisi baik.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan, jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini memiliki landasan filsafat post positivism dengan objek alamiah dengan tujuan memberikan gambaran mengenai hal yang terjadi secara sosial namun masih dalam konteks alamiah dengan proses interaksi antarpenulis dengan gambaran yang terjadi di lapangan penelitian (Hasan, 2002).

Metode penelitian kualitatif memiliki kelebihan diantaranya mempunyai data primer artinya data yang diambil merupakan murni sebagaimana yang terjadi di lapangan dan diuraikan secara deskriptif (Mathew, 1992), lebih mengedepankan

proses yang terjadi (Kuncoro, 2009), dianalisis secara induktif, terakhir karena berfokus pada kemurnian suatu masalah yang terjadi (Iskandar, 2010).

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah database yang digunakan untuk mendapatkan referensi pada penelitian yang akan dilakukan. Penulis menetapkan situs penelitiannya pada Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan Kelurahan Pakintelan yang terletak di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

1.10.3 Subjek Penelitian

Informan merupakan individu atau seseorang yang dipandang dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian kualitatif deskriptif ditentukan pada saat penulis mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Berdasarkan pengertian tersebut penulis mendeskripsikan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Kelurahan Pakintelan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam perkembangan Kelurahan Pakintelan termasuk Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan sebagai pihak pemerintah yang menyalurkan bantuan secara langsung maupun tidak langsung untuk pembangunan Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan dan kepada pengrajin sehingga pada penelitian ini peran Kepala Kelurahan sebagai salah satu subjek penelitian dapat membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di kampung Kerajinan Bambu dan Rotan. Koordinator Kampung Kerajinan bambu dan Rotan dipilih sebagai salah satu subjek pada penelitian ini karena memiliki kriteria sebagai penanggungjawab penuh dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Koordinator sebagai pihak yang

mengkoordinasikan kepada pihak terkait seperti pemerintah dan para pengrajin mengenai keberjalanan Kampung Kerajinan bambu dan rotan agar tidak terjadi miskomunikasi sehingga koordinator dapat membantu penulis dalam memberikan informasi pada penelitian ini. Pengrajin Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan sebagai salah satu subjek dalam penelitian ini memiliki kriteria sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program kampung kerajinan bambu dan rotan sehingga dapat membantu penulis dalam memberikan informasi pada penelitian ini. Subjek penelitian yang terakhir adalah masyarakat Kelurahan Pakintelan sebagai pihak luar yang berkaitan dengan Kampung Kerajinan bambu dan rotan yang dijadikan penulis sebagai sumber dan target dalam mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Informan yang sudah dijelaskan dapat membantu penulis untuk menggali informasi secara mendalam tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

1.10.4 Jenis Data

Kategori data kuantitatif dan kualitatif merupakan dua klasifikasi data, menurut Sugiyono (2015). Data kualitatif diartikan oleh Sugiyono (2015) sebagai informasi yang disajikan dalam bentuk kata, skema, dan gambar, serta dikaitkan dengan atribut, atau kualitas. Jenis data kualitatif diperoleh melalui wawancara, pengamatan, diskusi, serta menganalisis. Jenis data kualitatif sering disebut juga data naratif sehingga dapat menjelaskan objek penelitian di lapangan secara murni, langsung dan menjeaskan yang sebenar-benarnya terjadi di lapangan (Sugiyono,

2016). Dengan demikian penjabaran objek penelitian bersifat relatif. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat objek penelitian (Triyono, 2021).

1.10.5 Sumber Data

Data yang berkaitan dengan data yang akan diambil merupakan sumber data. Data, sebagaimana dinyatakan dalam sumbernya, terdiri dari dua kumpulan informasi berbeda:

a. Data Primer

Data primer awal terdiri dari informasi yang relevan langsung dengan permasalahan yang dihadapi. Sugiyono (2016:225) lebih lanjut menegaskan bahwa data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek. Data primer adalah rincian yang dikumpulkan dari lapangan penelitian itu sendiri yang berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian (Hasan 2002:82). Data primer dapat diperoleh dari informasi individu maupun kelompok tergantung keperluan penelitian. Adapun informasi yang diambil melalui wawancara, informasi lapangan, serta informasi dari seorang informan.

b. Data Sekunder

Memfaatkan sumber informasi sekunder sangat penting ketika melakukan penelitian untuk mengatasi masalah tertentu. Data sekunder menurut Hasan (2002:58) terdiri dari informasi yang diperoleh dari pihak pertama oleh pihak kedua, yang kemudian dicari. Adapun data sekunder menurut Kuncoro (2009:145) adalah data yang telah ditelaah oleh pihak sebelumnya kemudian diambil sebuah informasi dari pihak sebelumnya tersebut untuk dijadikan acuan maupun referensi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini diambil dari

literature review, penelitian terdahulu, buku-buku, dan artikel jurnal yang dapat diakses secara online.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan kebutuhan penelitian, data dikumpulkan dengan menggunakan berbagai praktik. Selain wawancara dan dokumentasi, observasi juga digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Berikut ini teknik yang dapat dilakukan oleh peneliti terkait teknik pengumpulan data yang diambil:

a. Observasi

Observasi atau dalam istilah lain adalah pengamatan, menjadi bagian dari pendekatan dalam mendapatkan data di lapangan. Guba dan Lincoln dalam Agus Triyono (2021) menegaskan adanya dasar bahwa pengamatan menjadi salah satu teknik yang cukup mewakili proses mendapatkan data, artinya teknik pengamatan didasarkan pada pengalaman langsung di lapangan. Dengan menggunakan metodologi ini, seseorang dapat secara langsung mengamati, mendokumentasikan, dan membedakan perilaku dan kejadian yang terjadi. Pengetahuan proporsional yang diperoleh melalui data memungkinkan penulis mendokumentasikan peristiwa yang terjadi dalam situasi melalui penggunaan teknik observasi. Teknik pengamatan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan atau bias.

Pada teknik observasi penulis ikut serta dalam kegiatan obyek penelitian, dengan mengamati kegiatan obyek. Penulis melakukan observasi di wilayah Kampung Kerajinan Bambu dan Rotan Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang.

b. Wawancara

Melakukan wawancara merupakan suatu metode pengumpulan informasi melalui proses tanya jawab terstruktur maupun tidak terstruktur kepada partisipan atau informan. Komunikasi yang dilakukan dalam wawancara meliputi informasi yang didapat dari pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk dijawab oleh seorang informan terkait penelitian. Biasanya dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan secara mendalam. Hal ini karena banyak aspek-aspek penting yang dapat menunjang keberlangsungan penelitian secara jelas. Adapun yang dimaksud wawancara mendalam yaitu pemberian informasi yang akurat dengan tujuan yang jelas untuk penelitian kemudian wawancara secara dialog dua arah (Agus Triyono: 2021).

c. Dokumentasi

Sebagai metode observasi dan evaluasi, dokumentasi digunakan. Istilah "dokumen" mencakup catatan pribadi dan resmi.

- Kronik tertulis mengenai tindakan, pengalaman, dan keyakinan individu merupakan dokumentasi pribadi. Memperoleh penjelasan otentik mengenai situasi sosial dan pentingnya berbagai faktor yang berkaitan dengan subjek penelitian adalah tujuan dari metode pengumpulan data ini. Buku harian, korespondensi pribadi, dan otobiografi merupakan dokumentasi ini.
- Bentuk dokumentasi eksternal dan internal terdiri dari dokumen resmi. Lembaga masyarakat memelihara dokumen internal, yang meliputi pengumuman, memorandum, instruksi, dan peraturan. seperti keputusan rapat, putusan pimpinan, dan lainnya. Dokumen eksternal terdiri dari

dokumen yang berasal dari lembaga-lembaga dari luar seperti lembaga sosial, media massa, dan lainnya.

Materi Audio Visual, seperti menganalisis foto dan rekaman video, mengumpulkan email, merekam situasi sosial individu, kelompok, maupun komunitas lainnya.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis kuantitatif dapat dilakukan secara interaktif dan bertahan sampai pada kesimpulan, sebagaimana ditegaskan Milles dan Hubberman (2008:246). Menurut Miles dan Huberman (1992:15–19), tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut :

- a) Pengumpulan data, dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi di lokasi penelitian.
- b) Reduksi data, transformasi data secara kasar dimulai fokus wilayah penelitian
- c) Penyajian data secara narasi maupun tabel.

Kesimpulannya menegaskan bahwa pengumpulan data yang diperoleh harus terperinci apa adanya yang terjadi di lapangan dengan mengedepankan pola-pola dari sebab akibat permasalahan penelitian.

1.10.8 Kualitas Data

Kualitas data diperoleh dari hipotesis sehingga termasuk data penting dalam penelitian. Instrumen data menjadi kualitas penelitian data. Uji data penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Adapun metode tersebut memanfaatkan perbandingan wawancara dengan objek penelitian. Pemeriksaan sumber lain

menjadi model triangulasi dalam menghilangkan dikotomi sehingga terciptanya teori yang tepat.

Pada penelitian ini, teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria derajat kepercayaan dengan melakukan triangulasi. Nasution (2003: 115) mengemukakan triangulasi dilakukan untuk mengecek sumber data melalui hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Selain digunakan untuk mengecek kebenaran data, triangulasi juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Teknik triangulasi dengan sumber berarti penulis membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan:

1. Membandingkan data hasil observasi dengan wawancara.
2. Membandingkan data yang diungkapkan di depan umum dengan apa yang diungkapkan saat pembicaraan pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan pendapat dari orang lain dengan perspektif berbagai pihak.
4. Membandingkan data wawancara dan observasi dengan berbagai dokumen yang berkaitan.

Penggunaan metode triangulasi menjadikan penulis dapat memeriksa keabsahan data yang telah dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga derajat kepercayaan data dapat diperoleh dengan valid.